



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997  
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 telah ditetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan
  - b. 90% (sembilan puluh persen) sisanya merupakan bagian Daerah Tingkat II, dengan pembagian sebagai berikut:
    - 1) 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan berdasarkan perbandingan panjang jalan Daerah Tingkat II terhadap jalan Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
    - 2) 45% (empat puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.
- (2) Panjang jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1) adalah panjang jalan Nasional, Propinsi, dan atau Kabupaten/Kotamadya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Administrasi pelaksanaan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 4

Wajib Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyampaikan laporan tentang penjualan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 173